

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Skripsi ini akan membahas mengenai alasan-alasan yang melatarbelakangi pemerintah Inggris di bawah kepemimpinan dari David Cameron di dalam mengambil kebijakan dalam rangka merespon pertumbuhan populasi Muslim di Inggris.

Inggris merupakan salah satu negara sekuler di mana mereka berusaha untuk memisahkan kehidupan sosial-politik mereka dari nilai-nilai agama. Namun, meskipun Inggris merupakan negara sekuler, akan tetapi, pemerintah Inggris tetap mengedepankan keharmonisan antar sesama umat beragama di sana supaya tidak terjadi gesekan antar umat beragama dan menimbulkan konflik sosial di dalam negeri Inggris sendiri. Hal ini seperti yang tersebut di dalam *article 9 freedom of religion* (Liberty).

Di dalam pasal tersebut disebutkan bahwa orang di Inggris memiliki hak-hak untuk: hak untuk berpindah keyakinan atau agama, hak untuk menjalankan ajaran agama mereka (baik secara pribadi maupun di depan publik, sendiri maupun berjamaah), hak untuk menjalankan ajaran agama, praktik, mengamati, dan hak untuk tidak memiliki agama (ateis atau agnostik) atau tidak memiliki agama yang dilindungi (seperti pacifism dan veganism).

Agama juga mempunyai peran yang penting di dalam politik Inggris. Sistem monarki Kerajaan Inggris pengikutnya yang beragama Nasrani yang ini berarti bahwa mereka kemudian akan menjadi bagian dari *Church of England*. Dari banyaknya umat Nasrani disana, sekitar tiga per empat merupakan Kristen Protestan, dan hanya ada sedikit Katolik. Selain itu, kita juga bisa melihat di wilayah Irlandia Utara di mana agama dan politik sangat mempunyai keterikatan yang tinggi, yang mana wilayah tersebut terbagi dua antara Kristen Protestan dan Katolik yang menyebabkan konflik yang berkepanjangan di wilayah Irlandia Utara tersebut (Peters, 1998).

Meskipun jumlah pemeluk agama Islam di sana masih sedikit, akan tetapi, jumlahnya tiap tahun terus mengalami pertumbuhan dan membuat Islam menjadi agama dengan pertumbuhan pengikut paling cepat di Inggris. Kita bisa melihatnya buktinya pada hasil sensus yang dikeluarkan oleh pemerintah Inggris pada tahun 2011 yang lalu. Dari hasil sensus tersebut, didapatkan data bahwa populasi Muslim di Inggris mengalami peningkatan, jumlah Muslim di Inggris mencapai 2.786.866 jiwa (The Muslim Council of Britain, 2015). Angka tersebut merupakan hasil sensus yang dilakukan pada tahun 2011 tersebut telah menunjukkan grafik peningkatan Muslim di Inggris hampir mencapai dua kali lipat apabila dibandingkan dengan sensus yang dilakukan pada tahun 2001 yang berjumlah sekitar 1,55 juta jiwa.

Sensus tersebut dilakukan oleh tiga lembaga non-kementerian yang ada di Inggris, *Office for National Statistics* (OSN) yang bertanggungjawab melakukan sensus di wilayah Inggris dan Wales, kemudian *General Register Office for Scotland*

(GROS) yang melakukan sensus di wilayah Skotlandia, dan *Northern Ireland Statistics and Research Agency* (NISRA) yang melakukan sensus di wilayah Irlandia Utara.

Pertumbuhan populasi Muslim yang ada di Inggris juga merupakan bagian dari pertumbuhan jumlah Muslim yang ada di dunia pada saat ini jumlahnya mencapai 23 persen dari total populasi manusia di dunia yang mencapai 7 milyar jiwa menurut data dari PBB. Dan saat ini banyak orang yang tertarik untuk meneliti mengapa pertumbuhan dari jumlah umat Muslim yang ada di dunia berjalan begitu cepat apabila dibandingkan dengan pertumbuhan agama lain, terlebih lagi dunia saat ini sedang diributkan dengan fenomena islamophobia di mana banyak masyarakat non-Muslim yang takut dan enggan untuk berurusan dengan umat Islam.

Kedekatan antara Islam dengan Inggris sudah berlangsung sejak lama, tepatnya ketika Kerajaan Inggris bergabung dengan pasukan Nasrani di dalam Perang Salib melawan umat Islam. Hal ini bisa dilihat dari sejarah yang menyebutkan bahwa raja Inggris, Richard I (*The Lion Heart*) bergabung di dalam pasukan Nasrani untuk melawan umat Islam pada Perang Salib ketiga (BBC History, 2009), yang pada saat itu berhadapan dengan Salahudin Al Ayyubi sebagai pemimpin dari pasukan Islam. Keterkaitan antara Inggris dan Islam kemudian berlanjut di masa kolonialisasi, di mana Inggris banyak menjadikan negara dengan penduduk yang mayoritas Islam sebagai salah satu wilayah kekuasaannya, terutama di wilayah Asia Selatan dan Tenggara.

Populasi Muslim di Inggris sebagian besar merupakan imigran yang berasal dari berbagai belahan dunia, terutama dari wilayah Asia dan Afrika. Negara-negara

Asia Selatan seperti Pakistan dan Bangladesh merupakan dua dari beberapa negara yang banyak memberikan kontribusi di dalam pertumbuhan jumlah populasi Muslim di Inggris saat ini. Dan juga beberapa negara yang pernah menjadi wilayah jajahan Inggris ketika masih berada pada zaman kolonialisasi merupakan negara-negara dengan penduduk yang mayoritas beragama Islam seperti Pakistan, Bangladesh, Malaysia, Brunei Darussalam, dan lain-lain.

Hasil sensus tahun 2011 menunjukkan bahwa ada 599.427 imigran Muslim yang masuk ke Inggris (The Muslim Council of Britain, 2015), Muslim pendatang yang masuk di Inggris mayoritas berasal dari negara-negara di Asia Selatan, Timur Tengah, Afrika Utara, Eropa, dan lain-lain. Dan, menurut data yang ada, Pakistan merupakan negara dengan jumlah imigran Muslim terbanyak yang ada di Inggris. Pada pertengahan tahun 2008, *Office for National Statistic* memperkirakan ada sekitar 899.000 orang Pakistan di Inggris, dan dari jumlah tersebut sekitar 827.080 jiwa merupakan Muslim. Selain dari Asia, Eropa, dan Afrika, para imigran Muslim yang datang ke Inggris ada juga yang berasal dari wilayah Amerika dan Oseania, meskipun jumlahnya tidak banyak. Para imigran yang datang ke Inggris mayoritas mereka bertujuan untuk mencari kondisi ekonomi yang lebih baik lagi, namun, ada juga yang datang karena faktor keamanan.

Selain dipengaruhi dengan banyaknya imigran Muslim yang masuk ke Inggris, pertumbuhan populasi Muslim disana juga dipengaruhi dengan banyaknya muallaf atau orang yang tadinya bukan Muslim kemudian menjadi seorang Muslim. Pada sensus

tahun 2001, ada puluhan ribu orang di Inggris yang berpindah agama menjadi seorang orang Muslim atau mualaf, dan jumlahnya naik menjadi sekitar 100 ribu pada tahun 2010 (Brice, 2010). Hal ini juga menunjukkan adanya penerimaan yang baik dari sebagian masyarakat asli Inggris terhadap keberadaan umat Muslim di sana.

Ketika populasi Muslim di Inggris terus bertambah dengan cepat dan menjadi agama dengan pertumbuhan paling pesat di Inggris sesuai hasil sensus tahun 2011, akan tetapi pada waktu yang bersamaan, negara-negara Barat, termasuk Inggris dilanda fenomena islamophobia. Salah satu peristiwa yang menjadi pukulan telak bagi umat Islam adalah peristiwa pengeboman gedung *World Trade Center* (WTC) di New York, Amerika Serikat pada tanggal 11 September 2001 yang dituduh dilakukan oleh orang-orang Islam dengan ideologi yang radikal, Al-Qaeda. Orang-orang non-Muslim kemudian merasa ketakutan dan menganggap bahwa Islam adalah agama yang identik dengan terorisme, bahkan Amerika Serikat dan sekutunya kemudian mengkampanyekan “*war on terrorism*” sebagai balasan bagi peristiwa pengeboman tersebut, akan tetapi hal tersebut dianggap perang melawan Islam.

Apalagi di Inggris ditambah lagi dengan peristiwa pengeboman di stasiun kereta api bawah tanah (*Underground*) dan beberapa bus di London pada 7 Juli 2005. Hal tersebut yang kemudian dianggap sebagai peristiwa yang memojokkan umat Muslim Inggris dengan munculnya kembali fenomena Islamophobia karena kejadian tersebut dilakukan oleh kelompok radikal Islam. Islamophobia dengan cepat menyebar

ke seluruh dunia, terutama negara-negara yang dimana umat Islamnya adalah masyarakat minoritas, termasuk di Inggris.

Sementara di Inggris sendiri, istilah islamophobia mulai digunakan pertama kali oleh surat kabar *Independent* pada tahun 1991 ketika mencetak sebuah review buku (Richardson, 2011). Namun, pada tahun 2003, *House of Lord* mengemukakan bahwa penggunaan kata islamophobia pertama kali pada akhir 1980-an oleh Dr. Zaki Badawi ataupun Fuad Nahdi yang bertujuan untuk melawan gerakan anti-Muslim di dalam masyarakat Inggris pada waktu itu (Richardson, 2011). Muslim di Inggris juga merasakan hal yang sama dengan umat Muslim yang lain di seluruh dunia, di mana mereka merasa mendapatkan perlakuan diskriminatif dan dianggap sebagai teroris. Banyak diantara Muslim di Inggris yang mendapatkan perlakuan yang diskriminatif dari orang-orang yang membenci Islam, mulai dari kekerasan verbal hingga fisik, perusakan masjid, pemberitaan media yang buruk tentang Islam, politisi yang menyudutkan Muslim di Inggris, dan lain-lain (Commission on British Muslims and Islamophobia, 2004).

Melihat dari fenomena yang terjadi, bahwa populasi Muslim di Inggris terus meningkat dari tahun ke tahun, dan jumlahnya pada tahun 2011 sudah mencapai 2,8 juta jiwa membuat pemerintah Inggris berusaha untuk memanfaatkan keberadaan mereka supaya bisa memberikan kontribusi yang maksimal untuk kemajuan Inggris, termasuk mendorong perekonomian dalam negeri Inggris sendiri. Namun, pada saat yang bersamaan pula, negara-negara Barat, termasuk juga Inggris sedang dilanda

islamophobia di mana masyarakat Barat merasa ketakutan dengan eksistensi Islam dan keberadaan umat Muslim di antara mereka yang dianggap sebagai orang-orang membahayakan. Bahkan, survei yang dilakukan oleh *YouGov* menunjukkan bahwa rakyat Inggris menolak Islam berkembang di negara mereka, dan menolak orang Muslim menjadi tetangga mereka (Allen, 2010).

Kebijakan dari pemerintahan David Cameron sangat penting di dalam isu pertumbuhan populasi Muslim yang ada di Inggris, selain pemerintah harus melindungi kepentingan rakyat asli Inggris sendiri dari ancaman keamanan, pemerintah Inggris juga harus mampu memanfaatkan imigran Muslim demi kemajuan negara mereka, seperti di dalam masalah ekonomi. Inilah yang sering disebut oleh Tony Blair dan Gordon Brown sebagai *economic migration benefited*. Akan tetapi, kita tahu bahwa antara Tony Blair dan David Cameron berasal dari partai yang berbeda, di mana David Cameron berasal dari partai Konservatif yang memiliki ideologi yang berbeda dengan partai Buruh, serta pada umumnya bersifat lebih anti terhadap para imigran.

Partai Konservatif Inggris yang merupakan partai sayap kanan Inggris memiliki ideologi yang berbeda dan memiliki pandangan yang berbeda terhadap masalah imigran, imigran Muslim, dan di dalam masalah kebijakannya yang mereka ambil. Partai Konservatif lebih bersifat nasionalis dan anti imigran karena mereka beranggapan bahwa para imigran akan membahayakan kondisi dalam negeri Inggris mulai dari merebut lapangan pekerjaan hingga mengancam kondisi sosial dan keamanan dalam negeri Inggris. Partai Konservatif juga lebih keras di dalam

menangani masalah imigran dan juga memiliki ideologi yang lebih ekspansionis di dalam masalah kebijakan luar negeri.

Di bawah pemerintahan David Cameron, dia berjanji untuk mengurangi masuknya imigran ke Inggris, terlebih lagi imigran Muslim yang berasal dari wilayah Timur Tengah dan Asia Selatan yang di mana mereka banyak dikaitkan dengan kelompok Islam radikal dan mereka dianggap bagian dari kelompok tersebut dan sering melakukan aksi terorisme di berbagai negara. Pemerintah Inggris beserta parlemen Inggris berhasil untuk membuat undang-undang *Immigration Act 2014* yang di dalamnya banyak mengatur masalah pemulangan imigran ke negara asal mereka atau deportasi. Namun, sebelum adanya undang-undang imigrasi tersebut pun pemerintah Inggris juga sudah aktif di dalam upaya mereka membatasi masuknya imigran ke Inggris dan memulangkan imigran yang bermasalah ke negara asal mereka masing-masing yang dimulai sejak David Cameron terpilih pada tahun 2010.

David Cameron di dalam masalah menangani kelompok Islam radikal, dia masih hampir sama dengan pemerintahan sebelumnya mereka sama-sama menggunakan kekuatan militer untuk melawan kelompok Islam radikal. Ketika pada pemerintahan partai Buruh di bawah Tony Blair dan Gordon Brown mereka melakukan invasi ke Afghanistan, langkah yang hampir sama juga dilakukan oleh pemerintahan David Cameron untuk melakukan penyerangan terhadap kelompok ISIS (*Islamic State in Iraqy and Syria*). David Cameron di dalam membuat kebijakan juga banyak

mendapatkan pengaruh dari *The Henry Jackson Society*, di mana organisasi tersebut memang organisasi yang suka dengan aksi militer di dalam kegiatan luar negeri.

Selain itu, pemerintah Inggris juga berusaha melindungi keamanan dalam negeri mereka dengan cara mencegah penyebaran paham radikal yang ada di Inggris. Pemerintah Inggris bekerjasama dengan banyak pihak untuk mencegah menyebarnya pemikiran yang radikal di dalam masyarakat Muslim Inggris, pemerintah Inggris terus berupaya mendorong supaya masyarakat Muslim Inggris mempunyai pemikiran yang lebih moderat. Pemerintah Inggris juga aktif di dalam memerangi kelompok-kelompok Islam yang berpaham radikal, seperti yang dilakukan oleh pemerintah Inggris di bawah David Cameron di mana Inggris bergabung untuk ikut di dalam perang melawan kelompok Islam radikal ISIS.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis mencoba untuk meneliti permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

“Mengapa pemerintah Inggris di era David Cameron mengeluarkan kebijakan restriktif dalam rangka merespon fenomena pertumbuhan populasi Muslim di Inggris?”

C. Kerangka Pemikiran

Untuk menjawab pokok permasalahan yang telah di uraikan, maka penulis perlu untuk mendeskripsikan jawaban dengan menggunakan teori maupun konsep sebagai kerangka pemikiran.

Model Pengambilan Kebijakan dari David Easton:

Gambar 1



Sumber: https://www.google.co.id/search?q=teaching+the+political+system+easton&biw=1366&bih=667&source=lnms&tbn=i sch&sa=X&ved=0ahUKEwj5z4KWn93JAhUUzmMKHUaxALQQ_AUIBigB#imgrc=_QzjiE7T3xqOSM%3A

Dari gambar bagan di atas, David Easton mencoba untuk menjelaskan interaksi antara anggota yang terlibat di dalam suatu sistem politik yang memiliki kebiasaannya masing-masing di dalam peran mereka. Dari gambar bagan di atas, Easton memberikan kita 4 premis utama di dalam arus model yang dia buat yaitu sistem, lingkungan, respon, dan kemudian yang terakhir adalah umpan balik (Pooja Articles, 2013).

Sistem menurut Easton di sini adalah sistem politik yang mana di dalamnya banyak sekali aktor yang terlibat seperti partai politik dan organisasi-organisasi yang memiliki kepentingan. Sistem politik adalah keseluruhan dari interaksi-interaksi yang mengatur pembagian nilai-nilai secara autoritatif (berdasarkan wewenang) untuk dan atas nama masyarakat (Budiardjo, 2008). Sistem menurut Easton harus mengandung nilai, budaya, otoritas, pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, partisipasi, proses, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah lingkungan, lingkungan menurut Easton ada dua yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal kondisi dalam negeri sebuah negara itu sendiri mulai dari sosial hingga alam, sedangkan lingkungan eksternal adalah sistem politik internasional, aliansi, dan lain-lain.

Sebuah sistem politik harus memiliki respon terhadap fenomena yang sedang terjadi dilingkungannya, baik itu bersifat positif maupun negatif. Sebuah sistem politik juga harus melaksanakan tugasnya di samping juga melaksanakan tugas-tugas yang lain seperti, memastikan setiap perubahan yang terjadi pada lingkungannya sesuai dengan identitas nasionalnya. Sebuah sistem politik dikendalikan oleh *input* dan *output*, yang di mana *input* terdiri atas tuntutan dan dukungan, sedangkan *output* terdiri atas keputusan dan kebijakan dari sebuah pemerintahan.

Keberadaan *Input* adalah untuk memberikan informasi serta fakta-fakta yang kemudian harus diolah oleh sistem itu sendiri, dan juga merupakan sumber kehidupan yang dibutuhkan demi keberlangsungan sistem itu sendiri (Mohtar & Mac, 2008). Sebuah sistem politik ada karena masyarakat melibatkan diri mereka dengan cara

memberikan tuntutan-tuntutan yang harus dipenuhi, namun, terkadang tuntutan mereka tidak dapat dipenuhi secara maksimal oleh pemerintah. Tuntutan bisa menjadi sebuah *input* didalam sebuah sistem politik apabila tuntutan mereka disampaikan secara terorganisir dengan baik.

Tuntutan masih terbagi lagi kedalam dua jenis yaitu eksternal dan internal. Tuntutan eksternal berasal dari lingkungan yang terdiri atas berbagai macam sistem yang ada di dalamnya seperti ekologi, ekonomi, kebudayaan, kepribadian, struktur sosial, dan demografi. Masing-masing sistem ini merupakan suatu kumpulan variabel-variabel dalam lingkungan tersebut yang membantu atau mempengaruhi pembentukan jenis tuntutan yang masuk ke dalam suatu sistem politik (Mohtar & Mac, 2008). Akan tetapi, tidak semua tuntutan yang ada berasal dari lingkungan eksternal, tuntutan juga bisa datang dari dalam sistem. Ketika sebuah sistem berjalan, tuntutan-tuntutan mungkin saja bisa timbul demi tujuan untuk merubah interaksi-interaksi politis diantara anggota-anggota itu sendiri, yang disebabkan oleh ketidakpuasan dari interaksi-interaksi yang terjadi.

Supaya sebuah sistem tetap bisa menjalankan fungsinya dengan baik, sistem itu membutuhkan energi dalam bentuk tindakan-tindakan yang memajukan dan merintangangi suatu sistem politik, tuntutan-tuntutan yang timbul di dalamnya, dan keputusan-keputusan yang dihasilkannya, hal ini yang disebut dengan dukungan. Apabila tidak ada dukungan maka tuntutan yang diinginkan tidak bisa terwujud atau konflik kepentingan tidak akan terselesaikan. Dukungan di sini terbagi kedalam dua

bentuk yaitu berwujud aksi-aksi yang mendorong tercapainya tujuan, kepentingan, dan tindakan orang lain. Yang kedua bisa jadi dukungan dalam bentuk pemberian suara kepada seorang calon pemimpin didalam pemilihan umum, atau membela atau mempertahankan keputusan yang dibuat oleh badan yang berwenang.

Selain tindakan-tindakan dukungan nyata seperti di atas, dukungan bisa juga diberikan dalam bentuk tingkah laku, seperti bersedia melakukan sebuah tindakan untuk orang lain. Pada tingkatan ini memang tidak begitu nampak bentuk dukungannya, akan tetapi, dukungan dalam bentuk ini mempunyai dampak yang besar karena sikap yang ditunjukkan oleh seseorang dan tindakan yang dilakukannya sesuai. Dukungan didalam sebuah sistem terbagi atas dua sasaran, yaitu wilayah dukungan serta kuantitas dan ruang-lingkup dukungan. Dukungan yang dimasukkan ke dalam sistem politik dan mengarah pada tiga sasaran; komunitas, rejim, serta pemerintah.

1) Komunitas Politik

Sistem politik tidak akan berjalan apabila anggota-anggotanya di dalam sistem tersebut tidak bersedia mendukung kelompok yang berusaha untuk menyelesaikan perbedaan atau mendorong pembentukan keputusan yang berjalan dengan damai. Hal tersebut yang dinamakan dengan kesatuan nasional, dimana kesatuan nasional sangat penting sebagai prasyarat di dalam keberlangsungan dari sistem politik itu sendiri.

2) Rejim

Rejim merupakan gabungan semua unsur pengaturan yang mengatur langkah menangani sebuah tuntutan yang ditujukan kepada sistem dan cara menjalankan

keputusan. Ini yang disebut dengan aturan permainan, dan merupakan dasar penilaian dari mayoritas anggota untuk menentukan apakah tindakan yang dilakukan oleh anggota lain itu sah atau tidak. Masing-masing anggota sudah memahami cara menyelesaikan perbedaan yang ada ditandai dengan adanya kemauan untuk menyelesaikan secara bersama-sama.

3) Pemerintah

Pemerintah dibutuhkan karena mereka memiliki kemampuan untuk membuat keputusan berdasarkan tuntutan-tuntutan yang masuk, dan membantu sistem menyelesaikan perbedaan persepsi dari para anggotanya.

Untuk kuantitas dan ruang lingkup dukungan, di sini Easton menekankan pentingnya jumlah anggota yang mendukung sistem yang ada, terkadang hanya sebagian kecil saja dari anggota sistem yang mendukung sehingga tetap bisa memberikan dorongan untuk keberlangsungan dari sistem tersebut, namun akan lebih baik lagi apabila mayoritas dari anggota sistem memberikan dukungan terhadap sistem sehingga pemerintahan tetap berjalan baik. Ruang lingkup dari dukungan yang semakin luas juga akan semakin baik, dukungan yang awalnya hanya didapatkan dari parlemen kemudian meluas dengan banyak rakyat yang ikut mendukung juga akan membuat kebijakan lebih efektif.

Umpan balik adalah tanggapan terhadap keputusan atau kebijakan yang sudah dikeluarkan pemerintah. Pada umumnya sebuah kebijakan yang dikeluarkan pasti akan mendapatkan respon positif maupun negatif, maka dari itu kemudian ada umpan balik

yang kemudian menjadi dasar untuk masukan untuk pembuatan kebijakan yang selanjutnya maupun melakukan revisi kebijakan.

Apabila dikaitkan dengan rumusan masalah tentang sebab kebijakan yang diambil oleh pemerintah Inggris terhadap fenomena pertumbuhan populasi Muslim di sana, maka kita bisa menelaah mulai dari lingkungan yang mempengaruhi pengambilan kebijakan tersebut. Pertama dari lingkungan internal di mana masyarakat Inggris menolak keberadaan orang-orang Muslim yang ada di Inggris karena dianggap akan memberikan ancaman di dalam masalah pekerjaan maupun keamanan. Masuk ke lingkungan eksternal, bahwa kebijakan pemerintah Inggris juga mendapatkan pengaruh dari dunia internasional di mana mereka mereka perlu untuk mengevaluasi tentang masalah imigran Muslim karena dilatarbelakangi dengan banyaknya kasus kekerasan dan terorisme yang terjadi di berbagai negara yang di lakukan oleh kelompok Islam radikal. Keputusan dari negara sekutu seperti Amerika Serikat yang berperang melawan kelompok Islam radikal juga memberikan pengaruh pada lingkungan pengambilan kebijakan di Inggris.

Inggris juga harus mempertimbangkan karena Inggris merupakan salah satu negara yang menandatangani Konvensi PBB untuk masalah Pengungsi tahun 1951, dan juga menandatangani Konvensi Eropa untuk Hak Asasi Manusia, yang di mana kedua konvensi tersebut menuntut negara yang menandatangani mempunyai kewajiban untuk melindungi para pengungsi yang masuk ke negara mereka, dan tidak mengirim pulang ke negara asal apabila keamanan tidak terjamin.

Konteks tersebut kemudian dijadikan bahan masukan atau *input* untuk membuat kebijakan. Yang pertama adalah tuntutan yang berasal dari luar, di mana masyarakat Inggris itu menuntut supaya pemerintah Inggris melindungi mereka dari ancaman kaum imigran, terlebih lagi dari masuknya imigran Muslim yang dianggap sebagai ancaman bagi keamanan mereka. Kemudian tuntutan juga datang dari dalam sistem itu sendiri di mana David Cameron yang berasal dari partai Konservatif yang memiliki ideologi yang bersifat lebih anti imigran, memberikan tekanan kepada pemerintahan David Cameron supaya membuat kebijakan yang bisa melindungi masyarakat Inggris dari ancaman para imigran.

Dukungan sebagai salah satu *input* berasal dari masyarakat Inggris yang memenangkan partai Konservatif pada pemilu tahun 2010 dan 2015 dengan memberikan suaranya dan kembali memilih partai Konservatif untuk memimpin Inggris, di mana masyarakat Inggris ingin supaya pemerintah Inggris bisa terus menjalankan kebijakan yang bisa melindungi masyarakat Inggris dari ancaman para buruh migran. Dukungan politik juga datang dari partai Liberal Demokrat dan United Kingdom Independence Party (UKIP) yang merupakan mitra koalisi partai Konservatif pada pemilu tahun 2010. Seperti yang disebutkan oleh David Easton bahwa dukungan bisa melalui berbagai bentuk, dan salah satunya adalah dengan memberikan suara atau mendukung untuk memenangkan pemilu. Dukungan tersebut membuat proses dari sebuah system di parlemen Inggris menjadi lebih mudah untuk David Cameron

mengambil sebuah kebijakan karena mendapatkan dukungan yang besar dari anggota sistem.

David Cameron yang berasal dari partai Konservatif Inggris yang sedang berkuasa tentu saja bisa dengan mudah untuk membuat kebijakan yang bisa melindungi masyarakat Inggris dari ancaman imigran. Sebagai penguasa di dalam parlemen Inggris, partai Konservatif tentu saja bisa dengan mulus ketika ingin menyetujui kebijakan dan rancangan undang-undang dari pemerintahan David Cameron. Ini membuat upaya pemerintah Inggris untuk menangani masalah imigran dan masalah populasi Muslim di Inggris bisa lebih mudah.

Sehingga kemudian pemerintahan David Cameron ini bisa membuat kebijakan yang anti imigran di mana Inggris di bawah kepemimpinannya berusaha untuk membatasi masuknya imigran ke Inggris dan memulangkan imigran yang bermasalah serta membuat undang-undang yang bisa membatasi masuknya imigran ke Inggris. Terlebih lagi bagi imigran Muslim yang menjadi salah satu faktor pendorong dari pertumbuhan populasi Muslim di Inggris, di mana mereka dianggap sebagai ancaman bagi ekonomi Inggris dan ancaman terhadap keamanan dalam negeri Inggris.

Karena selama ini, ketika Inggris di bawah kendali dari partai Buruh, undang-undang seperti *Immigration And Asylum Act 1999* dan *Immigration And Asylum Act 2002* yang ada hanya melindungi para imigran, dan justru menyusahkan masyarakat asli Inggris sendiri, jadi kebijakan tersebut perlu untuk direvisi lagi. Maka dari itu kemudian pemerintahan David Cameron berhasil membuat undang-undang

Immigration Act 2014 di mana undang-undang ini akan banyak mengatur masalah pemulangan imigran dari Inggris ke negara asal mereka. Selain itu, ketika terjadi pengeboman di London dan Glasgow pada 2005 dan 2007, pemerintahan Tony Blair dan Gordon Brown dianggap masih belum bisa mencegah penyebaran paham radikal sehingga terjadilah aksi terorisme di Inggris di masa pemerintahan partai Buruh. Jadi penting bagi David Cameron untuk memastikan jumlah populasi Muslim yang pada tahun 2011 sudah mencapai 2,8 juta untuk tidak menganut paham radikal supaya keamanan dalam negeri Inggris terjaga dan stabil.

Pemerintah Inggris berusaha membuat Muslim yang berada di Inggris menjadi Muslim yang berpaham moderat, di mana mereka harus mau untuk menjalankan nilai-nilai sekuler liberal sehingga Muslim Inggris akan terbebas dari paham radikal yang banyak dipakai oleh kelompok Islam radikal yang dianggap menjadi penyebab dari aksi terorisme di dunia. Maka dari itu, David Cameron mengajak komunitas-komunitas Muslim yang ada di Inggris supaya mereka mau bekerjasama dengan pemerintah di dalam menangkal penyebaran paham Islam radikal. Pemerintah Inggris juga ikut di dalam perang melawan kelompok Islam radikal yang banyak berkembang di wilayah Timur Tengah dan Asia karena dianggap sebagai sumber dari persebaran paham Islam radikal.

Banyak respon yang muncul atas kebijakan-kebijakan David Cameron, baik itu positif maupun negatif seperti masyarakat Inggris yang senang dengan kebijakan-kebijakan tersebut dan memilih kembali Cameron dan partai Konservatif untuk

memimpin Inggris. namun, di sisi lain, kebijakan dari Cameron untuk membatasi dan memulangkan para imigran mendapatkan pertentangan dari organisasi-organisasi hak asasi manusia.

D. Hipotesis

Dari latar belakang masalah, rumusan masalah, dan juga kerangka teori yang ada, maka dapat ditarik hipotesis bahwa pemerintah Inggris di era David Cameron mengeluarkan kebijakan yang restriktif dalam rangka menanggapi fenomena pertumbuhan populasi Muslim di Inggris karena:

1. Imigran bisa mengancam masyarakat asli Inggris dengan merebut lapangan pekerjaan yang ada di Inggris dari masyarakat asli Inggris.
2. Untuk menjaga keamanan dalam negeri supaya kejadian aksi teror yang melanda Inggris oleh Muslim Inggris pada tahun 2005 dan 2007 tidak terjadi lagi.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan alasan mengapa kebijakan-kebijakan pemerintah Inggris terhadap pertumbuhan populasi Muslim di negara tersebut ditengah fenomena islamophobia dibuat serta dijalankan.

2. Untuk memenuhi syarat akhir di dalam menempuh pendidikan jenjang S-1 di pada jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Pengumpulan data merupakan langkah dalam metode ilmiah. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah dengan mengadakan penilitian kepustakaan terhadap buku, literatur, makalah, jurnal ilmiah, majalah atau Koran, dan laporan tahunan dari yang diterbitkan oleh instansi atau badan pemerintah yang mengkaji masalah internasional dan sumber yang dianggap resmi, kemudian dianalisa, bagaimana tiap variabel berhubungan antara satu sama lain.

G. Jangkauan Penelitian

Untuk menjelaskan alasan dibalik diterapkannya kebijakan-kebijakan pemerintahan David Cameron sebagai respon dari pertumbuhan populasi Muslim di Inggris, penulis akan menggunakan data dari tahun 2010 di mana Inggris mulai dipimpin oleh David Cameron hingga saat ini atau tahun 2015 di mana David Cameron memulai pemerintahan periode keduanya. Namun, penulis juga akan menggunakan data-data yang berasal dari sebelum tahun 2010 yang akan mendukung data-data primer yang ada.

H. Sistematika Penelitian

Sebagai sebuah penulisan deskriptif, penulis membuat sub-sub pokok yang dapat menguraikan permasalahan untuk dapat menjawab pokok permasalahan diatas. Pada BAB Pertama, berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesis, metode penelitian, tujuan penelitian, jangkauan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB Kedua akan menjelaskan mengenai sejarah masuknya Islam di Inggris dan pertumbuhan populasi Muslim di Inggris ditengah isu islamophobia.

Pada BAB Ketiga, penulis akan menjelaskan tentang pemerintahan Tony Blair dan Gordon Brown, dan juga akan menjelaskan kebijakan-kebijakan yang mereka ambil terhadap Muslim Inggris.

Kemudian di BAB Keempat, penulis akan menjelaskan mengenai kebijakan-kebijakan apa saja yang diterapkan oleh pemerintah Inggris pada era David Cameron terhadap pertumbuhan populasi Muslim ditengah fenomena Islamophobia, serta alasan ataupun sebab dikeluarkannya kebijakan-kebijakan tersebut.

BAB Lima, merupakan bab terakhir yang penulis buat untuk menutup topik ini. Pada bab ini berisi tentang rangkuman dari bab-bab yang sebelumnya serta disusun dalam bentuk kesimpulan.